

UTS AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Nama : Muammad Dzaki Rizkia

NPM : 2053031004

Jawaban :

1. Karakteristik sektor publik sangat memengaruhi strategi pengelolaan keuangan dan sistem pelaporan keuangan Pemerintah Kota Andalas. Berbeda dengan sektor swasta yang berorientasi pada laba, sektor publik berorientasi pada pelayanan masyarakat dan kesejahteraan publik. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan pemerintah harus mengutamakan **transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan**.

Namun, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi informasi menjadi tantangan dalam mewujudkan tujuan tersebut. SDM yang belum memiliki kompetensi memadai dapat menyebabkan kesalahan pencatatan, keterlambatan penyusunan laporan, serta lemahnya pengendalian internal. Di sisi lain, keterbatasan teknologi informasi membuat proses pengelolaan keuangan masih dilakukan secara manual sehingga kurang efisien, rentan terhadap kesalahan, dan menyulitkan akses informasi bagi masyarakat.

Implikasi dari keterbatasan tersebut terhadap akuntabilitas publik antara lain:

- Menurunnya kualitas laporan keuangan karena informasi yang disajikan kurang akurat dan kurang tepat waktu.
- Berkurangnya transparansi karena masyarakat sulit memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran.
- Meningkatnya risiko terjadinya penyimpangan, kecurangan, dan pemborosan anggaran akibat lemahnya sistem pengawasan.
- Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah karena akuntabilitas pengelolaan keuangan belum optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Andalas perlu meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, mengembangkan sistem informasi pengelolaan keuangan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran, memperkuat pengawasan internal, serta memperluas akses publik terhadap informasi keuangan melalui media digital. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat meningkat meskipun terdapat keterbatasan sumber daya.

2. Pendekatan **Activity-Based Costing (ABC)** adalah metode penentuan biaya yang mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang benar-benar mengonsumsi sumber daya. Dalam program imunisasi massal, ABC membantu Dinas Kesehatan mengetahui biaya setiap aktivitas, seperti perencanaan program, pengadaan vaksin, distribusi vaksin, penyimpanan, pelaksanaan imunisasi, penyuluhan, hingga pelaporan dan evaluasi.

Dengan menggunakan ABC, pemerintah dapat mengidentifikasi aktivitas yang membutuhkan biaya terbesar sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi. Misalnya,

apabila biaya distribusi vaksin sangat tinggi, dinas dapat mengevaluasi rute distribusi atau kerja sama dengan fasilitas kesehatan agar biaya dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Selain itu, ABC membantu menghubungkan biaya dengan hasil (outcome), seperti jumlah masyarakat yang berhasil diimunisasi atau peningkatan cakupan imunisasi.

Penerapan ABC di sektor publik menghadapi beberapa tantangan, antara lain:

- **Keterbatasan sumber daya manusia**, karena pegawai perlu memahami konsep ABC dan mampu mengidentifikasi aktivitas secara tepat.
- **Keterbatasan teknologi informasi**, sehingga pengumpulan dan pengolahan data biaya menjadi lebih sulit.
- **Kompleksitas aktivitas sektor publik**, karena banyak layanan memiliki tujuan sosial yang sulit diukur secara finansial.
- **Biaya implementasi yang relatif tinggi**, terutama untuk pengembangan sistem, pelatihan pegawai, dan pengumpulan data.
- **Resistensi terhadap perubahan**, karena pegawai telah terbiasa menggunakan sistem penganggaran dan akuntansi tradisional.
- **Kesulitan mengukur outcome**, sebab keberhasilan program publik tidak hanya dinilai dari efisiensi biaya, tetapi juga manfaat sosial yang dihasilkan bagi masyarakat.

3. Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) merupakan serangkaian proses dan mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan peraturan yang berlaku. Dalam kasus Kabupaten Y, ketidaksesuaian antara realisasi anggaran pembangunan infrastruktur desa dengan rencana serta lemahnya pengawasan internal menunjukkan bahwa sistem pengendalian manajemen belum berjalan secara efektif.

Agar dapat mencegah penyimpangan, sistem pengendalian harus dirancang secara tepat melalui beberapa langkah berikut:

- **Pemisahan tugas dan wewenang**, sehingga tidak ada satu pihak yang menguasai seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran.
- **Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)** yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan setiap kegiatan.
- **Penerapan sistem pengendalian internal** yang meliputi otorisasi transaksi, verifikasi dokumen, serta rekonsiliasi secara berkala.
- **Monitoring dan evaluasi rutin** terhadap pelaksanaan proyek pembangunan untuk membandingkan realisasi dengan rencana anggaran.
- **Audit internal secara berkala** oleh Inspektorat Daerah guna mendeteksi penyimpangan dan memberikan rekomendasi perbaikan.
- **Pemanfaatan teknologi informasi** dalam pengelolaan keuangan agar proses pencatatan, pelaporan, dan pengawasan menjadi lebih transparan dan akurat.
- **Peningkatan kompetensi SDM** melalui pelatihan mengenai pengelolaan keuangan, pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan

4. Anggaran tradisional memiliki keunggulan dalam kemudahan penyusunan dan pengendalian pengeluaran, tetapi kurang mampu menilai efektivitas penggunaan anggaran. Sebaliknya, anggaran berbasis kinerja lebih berorientasi pada hasil sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Perubahan ke anggaran berbasis kinerja berpotensi membantu mengurangi defisit anggaran melalui alokasi dana yang lebih tepat sasaran, namun keberhasilannya harus didukung oleh peningkatan pendapatan daerah, pengawasan yang kuat, serta kapasitas SDM dan sistem informasi yang memadai.